

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Asnawi, M. Natsir. 2014. *Hermeneutika Putusan Hakim: Pendekatan Multidisipliner Dalam Memahami Putusan Pengadilan Perdata*, Yogyakarta: UII Press.
- Asikin, Zainal. 2015 *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Edisi Pertama. Kencana. Jakarta.
- Efendi, Jonaedi. 2018. *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim*. Cetakan Ke-1. Prenadamedia Group. Depok.
- Dwi Yuwono, Ismantoro. 2013. *Memahami Berbagai Etika Profesi dan Pekerjaan*. Cetakan Ke-1. Medpress Digital. Yogyakarta.
- Ibrahim, Jhony. 2008. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Cetakan Ke-1. Bayumedia Publishing. Malang.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cetakan Ke-1. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Mulyadi, Lilik. 2007. *Kekuasaan Kehakiman*. Bina Ilmu. Surabaya.
- Mertokusumo, Sudikno dan A. Pilto. 2013. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Cetakan Ke-2. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Mappiasse, Syarif. 2015. *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*. Edisi Pertama, Cetakan Ke-1. Kencana. Jakarta.
- Mahmud Marzuki, Peter. 2016. *Penelitian Hukum, Edisi Revisi, Cetakan Ke-12*. Prenadamedia Group. Depok.
- Mashudi. 2019. *Penyelesaian Sengketa Hubungan Industrial*. Jakad Publishing. Surabaya.
- Murya, Adnan dan Urip Sucipto. 2019. *Etika dan Tanggung Jawab Profesi*. Deepublish. Yogyakarta.
- Ochtorina Susanti, Dyah dan A'an Efendi. 2015. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Cetakan Ke-2. Sinar Grafika. Jakarta.
- Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata. 2009. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*. Mandar Maju. Bandung.
- RAS, Redaksi. 2010. *Tip Hukum Praktis: Hak dan Kewajiban*. Cetakan Ke-1.

Raih Asa Sukses. Jakarta.

Sudarsono. 1992. *Kamus Hukum*. Rineka Cipta. Yogyakarta.

Sangadji, Z.A. 2003. *Kompetensi Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara*. Citra Aditya Bakti. Bandung.

Sumaryati, Eka dan Tini K. 2013. *Thukah Anda? Tentang PHK dan Pesangon*. Cetakan Ke-1. Dunia Cerdas. Jakarta.

Sunarto. 2014. *Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata*. Edisi Pertama. Kencana. Jakarta.

Sejati, H.Hono. 2018. *Rekonstruksi Pemeriksaan Perkara di Pengadilan Hubungan Industrial Berbasis Nilai Adil, Cepat, dan Murah (studi Kasus di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta)*. Citra Aditya Bakti. Bandung.

Ugo dan Pujiyo. 2012. *Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Tata Cara dan Proses Penyelesaian Sengketa Perburuhan*. Cetakan Ke-2. Sinar Grafika. Jakarta.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

HIR (*Herziene Indonesisch Reglement*) tercantum dalam Berita Negara (*Staatblad*) Nomor 16 Tahun 1848.

RBg (*Rechtsreglement Buitengewesten*) tercantum dalam Berita Negara (*Staatblad*) Nomor 227 Tahun 1927.

Rv (*Reglement Op de Burgerlijke Recht Vordering*) tercantum dalam Berita Negara (*Staatblad*) Nomor 1847 Tahun 52 dan tambahan Berita Negara (*Staatblad*) Nomor 1849 Tahun 43.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*) tercantum dalam Berita Negara (*Staatsblad*) Tahun 1847 Nomor 23.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077).

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2014 tentang Kewenangan Mediator Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1435).

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: KEP.92/MEN/VI/2004 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Mediator Serta Tata Kerja Mediasi.

Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: SE-13/MEN/SJ-HK/I/2005 tentang Putusan Mahkamah Konstitusi atas Hak Uji Materil Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

C. PUTUSAN

Putusan Sela Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya No: 153/Pdt.Sus-PHK/2018/PN.Sby.

Putusan Sela Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta PNo: 34/Pdt.Sus-PHK/2019/PN.Yyk.

Putusan Sela Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta No: 39/Pdt.Sus-PHK/2019/PN.Yyk.

Putusan Kasasi No: 188 K/Pdt.Sus-PHI/2020.

D. TESIS

Delvina Kashita S., Safira. 2010. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Pada Perusahaan Swasta Di Kabupaten Probolinggo. *Tesis*. Sekolah Pascasarjana. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.

Ismail, Muh. Muzakki. 2012. Keabsahan Pemutusan Hubungan Kerja Berdasarkan Kesalahan Berat Yang Diatur Dalam Perjanjian Kerja Bersama (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Agung)". *Tesis*. Mahasiswa Fakultas Hukum. Program Pascasarjana. Universitas Indonesia. Jakarta.

Munir, Misbahul. 2007. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Yogyakarta. *Tesis*. Mahasiswa Magister Hukum. Sekolah Pascasarjana. Universitas

Gadjah Mada. Yogyakarta.

E. ARTIKEL SUATU JURNAL

Mahmud, Yohan., Rustam H. S. Akili, Yusrianto Kadir, Eoy Marthen Moonti, September 2019. *Restorative Justice dalam Putusan Hakim Nomor: 31/Pid.Sus/2018/Pn.Lbto atas Kasus Persetubuhan Terhadap Anak*. Makassar: SIGn Jurnal Hukum. Volume 1 Nomor 1.

F. WAWANCARA

Diah Susilowati. 2020. *Penjelasan dan Penafsiran Pasal 81 dalam Undang-Undang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial mengenai Kewenangan Mengadili (Kompetensi Relatif)*. Hasil Wawancara Pribadi: 29 Februari 2020 pukul 12.15 WIB. Hotel MM UGM Yogyakarta.

Ratnawati. 2020. *Kewenangan Disnakertrans dalam melakukan Mediasi jika terjadi Perselisihan Hubungan Industrial berdasarkan Pasal 11 Kepemenertrans Nomor 92 Tahun 2004*. Hasil Wawancara Pribadi: 24 Maret 2020 pukul 15.19 WIB. Kantor Hukum RAM and Partners Yogyakarta.